JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063- 3664
Vol. 2, No. 3, 2025

EFEKTIVITAS PROGRAM CADANGAN PANGAN PEMERINTAH (CPP) DI KELURAHAN BELIMBING KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

Dinda Jeny Saputri [1], Siti Raudah [2], Sri Agusmila Aneta Herlinda [3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: dindazenysputri@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk mengurangi beban masyarakat miskin. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi kendala seperti tidak tepatnya sasaran penerima, kurangnya petugas distribusi, serta ketidakjelasan jadwal pembagian (Peraturan Badan Pangan Nasional, 2023). Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi agar program CPP dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran (Steers, 2014). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif (Sugiyono, 2014). Hasil penelitian menunjukkan efektivitas yang cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Masyarakat sebagian besar sudah memahami program ini berkat sosialisasi awal, namun informasi lanjutan masih kurang sehingga tidak menjangkau seluruh warga. Dari sisi ketepatan sasaran, pelaksanaan program belum sepenuhnya berhasil karena masih terdapat penerima yang tidak memenuhi syarat, sementara yang layak justru tidak tercatat akibat pendataan yang tidak valid. Pelaksanaan sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP), dan bantuan dianggap bermanfaat oleh masyarakat karena mampu mengurangi beban pengeluaran harian. Namun, keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan, sebab tidak tersedia tim khusus yang menangani penyaluran bantuan di tingkat kelurahan. Lokasi 0distribusi dinilai strategis, namun waktu pembagian yang tidak menentu menimbulkan kebingungan bagi penerima. Faktor pendukung efektivitas program adalah kepatuhan terhadap SOP dan tingkat pemahaman masyarakat yang cukup baik, sedangkan hambatannya meliputi keterlambatan informasi, prosedur administrasi yang kompleks, dan data penerima yang kurang akurat. Secara keseluruhan, program CPP sudah berjalan cukup baik namun tetap membutuhkan perbaikan dalam pendataan dan mekanisme distribusi agar lebih tepat sasaran dan efisien. Untuk meningkatkan efektivitas program CPP, Lurah disarankan menetapkan jadwal penyaluran yang pasti dan diumumkan lebih awal. Petugas perlu menyederhanakan administrasi dan memberikan informasi terbuka. Masyarakat diharapkan aktif dalam sosialisasi dan memberikan data akurat agar bantuan tepat sasaran serta program berjalan lebih lancar dan bermanfaat.

Kata Kunci *:Efektivitas, Program, Cadangan Pangan Pemerintah*

ABSTRACT

The government distributes various social assistance programs, such as the Family Hope Program (PKH) and the Government Food Reserves Program (CPP), to alleviate the burden on the poor. However, the implementation of these programs faces obstacles such as inaccurate targeting of recipients, a lack of distribution staff, and an unclear distribution schedule (National Food Agency Regulation, 2023). This situation indicates the need for evaluation to ensure the CPP program runs more effectively and reaches its intended target (Steers, 2014). This research method uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type (Sugiyono, 2014). The results indicate quite good effectiveness, although several obstacles remain. Most people understand the program thanks to initial socialization, but follow-up information is still lacking, resulting in it not reaching all residents. In terms of targeting accuracy, the program has not been fully successful because some

recipients still do not meet the requirements, while those who are eligible are not recorded due to invalid data collection. Implementation has followed Standard Operating Procedures (SOPs), and the assistance is considered beneficial by the community because it can reduce daily expenses. However, limited human resources pose a barrier, as there is no dedicated team to handle aid distribution at the village level. The distribution locations are considered strategic, but the uncertain distribution times have caused confusion for recipients. Supporting factors for program effectiveness are adherence to standard operating procedures and a relatively high level of community understanding, while obstacles include delays in information, complex administrative procedures, and inaccurate recipient data. Overall, the CPP program has been running quite well, but still requires improvements in data collection and distribution mechanisms to ensure more targeted and efficient distribution. To increase the effectiveness of the CPP program, village heads are advised to establish a definite distribution schedule and announce it early. Officers need to simplify administration and provide transparent information. The community is expected to actively participate in outreach and provide accurate data to ensure targeted assistance and a smoother and more beneficial program.

Keywords: *Effectiveness, Program, CPP*

PENDAHULUAN

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sampai saat ini masih dimanfaatkan untuk tiga kebutuhan yaitu pada saat darurat, kerawanan pangan pasca bencana dan stabilitas harga (Peraturan Badan Pangan Nasional, 2023). Pada saat situasi darurat Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan Pemerintah demi menjaga ketahanan pangan rumah tangga bagi korban bencana sebanyak 200 ton setahun, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menyalurkan maksimal 100 ton setahun. Jumlah tersebut tidak harus dihabiskan, namun dengan kewenangan tersebut Gubernur, Bupati/Walikota mempunyai stok beras yang cukup untuk membantu korban bencana pada detik pertama.

Setelah situasi darurat berlalu, umumnya ada ancaman baru yaitu kerawanan pangan pasca bencana karena belum pulihnya perekonomian masyarakat pasca bencana, untuk itu Cadangan Pangan Pemerintah masih bisa dipergunakan untuk mengatasi rawan pangan pasca bencana tersebut. Tidak jauh berbeda dengan mekanisme pada saat darurat, pada saat situasi ini Gebernur/Walikota dapat menyampaikan jumlah kebutuhan beras untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga korban bencana kepada menteri sosial, dengan instruksi tersebut BULOG menyalurkan beras sejumlah permintaan yang dibutuhkan untuk lokasi yang memerlukan.

Berkaitan dengan penjelasan di atas dan mengenai adanya program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dari Badan Pangan Nasional pada Keluarga Penerima Manfaat tersebut, maka banyak Pemerintah dan wilayah di Indonesia yang mendapatkan Program Bantuan Sosial dalam bentuk beras atau Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tersebut, salah satunya adalah

pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan lebih khususnya pada Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang juga mendapatkan program bantuan sosial dalam bentuk pangan. Tim pendata harus memastikan bahwa kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia dan penyandang disabilitas tersebut terdata sebagai calon keluarga penerima manfaat (KPM) Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Total beras atau pangan yang di terima pada program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa Cadangan Pangan Pemerintah yaitu 10kg/KPM.

Dari hasil observasi awal penelitian dengan adanya bantuan sosial terutama Pada Program Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Kelurahan Belimbing memiliki 21 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah 5,8 Km2, memiliki jumlah penduduk sebanyak 4303 jiwa dengan jumlah 1355 Kepala Keluarga (KK). Dan 94 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dimana peneliti melihat dari banyaknya bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin, namun banyak keluhan dari masyarakat Desa Kelurahan Belimbing bahwa “ada masyarakat miskin yang tidak memperoleh bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)” atau sebaliknya “ada masyarakat yang tergolong mampu namun masih menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)”. Adapun juga kurangnya sosialisasi dari aparatur Desa mengenai adanya BPNT berupa Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sehingga masyarakat mendapatkan informasi berupa berita dari mulut kemulut yang membuat masyarakat kurang memahami mengenai bagaimana mekanisme adanya Program Bantuan Pangan Non-Tunai berupa Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang sebenarnya dan kurang jelasnya mengenai waktu pelaksanaan pembagian beras tersebut kepada masyarakat pada setiap bulannya, dikarenakan tidak adanya penjadwalan yang jelas mengenai waktu pembagian yang terkadang bisa terjadi diawal bulan, pertengahan bulan maupun akhir bulan. Ada 94 Keluarga Penerima Manfat (KPM) di Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang menerima Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menunggu pembagian beras sebanyak 10kg/KPM tersebut. Sehingga dengan adanya keluhan tersebut secara garis besar penulis dapat menemukan 3 (tiga) fenomena permasalahan terkait dengan Penerima Program Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Pangan Pemerintah tersebut pada keluarga penerima manfaat di Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yaitu sebagai berikut:

1. Tidak tepatnya sasaran penerima bantuan, dimana terdapat individu atau keluarga yang secara ekonomi mampu tetapi tetap menerima bantuan, sementara yang seharusnya berhak justru tidak terakomodasi, contohnya seperti keluarga yang mempunyai pendapatan tetap dan memiliki

rumah sendiri. Salah satu penyebabnya adalah tidak akuratnya data penerima bantuan, yang sering kali dipicu oleh perubahan domisili penduduk yang tidak diikuti dengan pembaruan data kependudukan, seperti alamat di KTP yang masih tercantum di lokasi lama, akibatnya nama-nama yang sebenarnya sudah tidak lagi berdomisili di wilayah tersebut tetap masuk dalam daftar penerima bantuan. Situasi ini memaksa pihak kelurahan atau instansi terkait untuk terus melakukan revisi data penerima, sehingga menghambat kelancaran proses administrasi, termasuk distribusi bantuan, pelaporan, dan pendataan ulang.

2. Kurangnya jumlah petugas dalam pembagian bantuan, Seharusnya petugas dalam Program Cadangan Pangan Pemerintah mempunyai lima (5) petugas Sehingga warga tidak harus menunggu lama karena keterbatasan tenaga kerja dalam mengatur dan mendistribusikan bantuan dan petugas tidak harus menangani lebih banyak tugas, yang dapat menurunkan kualitas pelayanan dan akurasi distribusi.
3. Masih kurang jelas dalam waktu pelaksanaan pembagian beras kepada masyarakat setiap bulannya yang dikarenakan tidak adanya penjadwalan waktu pembagian yang jelas, terkadang bisa terjadi diawal bulan, pertengahan bulan maupun akhir bulan Kondisi ini membuat keluarga penerima manfaat (KPM) harus bersabar menunggu tanpa kepastian, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat penerima bantuan.

Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah harus dievaluasi agar program ini berjalan dengan optimal dan indikator keberhasilan dapat dicapai semaksimal mungkin.

Berdasarkan latar belakang pada masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti "**Efektivitas Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong".**

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan ditentukan dengan purposive sampling sebanyak 11 orang. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman & Saldana, 2014).

PEMBAHASAN

1. Keberhasilan Program

a. Pengetahuan Masyarakat

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat dalam memahami Program Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah

(CPP) di Kelurahan Belimbing dapat dikatakan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan pemahaman secara menyeluruh.

b. Informasi yang didapat

Dari hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa informasi mengenai Program Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah dapat dikatakan kurang baik, perlu adanya peningkatan intensitas penyampaian informasi agar lebih merata. Kegiatan penyebaran informasi yang hanya dilakukan sekali di awal pelaksanaan membuat sebagian warga belum sempat menerima penjelasan secara lengkap, terutama mengenai prosedur dan sasaran bantuan.

2. Keberhasilan Sasaran

a. Ketepatan Sasaran

Pihak kelurahan menyatakan bahwa data penerima bantuan berasal dari Dinas Ketahanan Pangan dan sudah melalui proses verifikasi. Namun, berdasarkan keterangan dari staf dan fasilitator di lapangan, masih ditemukan penerima bantuan yang tidak sesuai, seperti warga yang sudah pindah domisili atau yang tergolong mampu secara ekonomi, tetapi tetap menerima bantuan. Sebaliknya, ada pula warga kurang mampu yang tidak terdata sebagai penerima.

Warga juga memberikan tanggapan yang beragam. Sebagian merasa bantuan yang diterima sudah sesuai dan sangat membantu. Namun, ada juga yang mengeluhkan bahwa masih ada warga yang lebih mampu secara ekonomi menerima bantuan, sementara warga yang lebih membutuhkan justru tidak mendapatkan. Bahkan, beberapa menyebutkan adanya ketimpangan karena faktor kedekatan dengan perangkat RT.

Dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran dalam program bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kelurahan Belimbing kurang baik. Meskipun sebagian penerima sudah sesuai, namun masih ditemukan ketidaktepatan yang memerlukan perbaikan, terutama dalam hal validasi data dan pengawasan pelaksanaan di lapangan.

b. Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Hasil wawancara dengan Lurah Kelurahan Belimbing, Bapak Mustapa Kamal Pasya, menyatakan bahwa pelaksanaan program telah mengikuti prosedur yang ditetapkan agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Ibu Erna Herniati, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, juga menegaskan bahwa meskipun SOP telah dijalankan, namun apabila terdapat penerima yang tidak dapat dihubungi, akan dilakukan penggantian dengan warga yang terdaftar dalam SK Kemiskinan.

Ibu Dewi Kurnia, staf pelaksana penyaluran, menambahkan bahwa SOP telah disosialisasikan dan dijalankan mulai dari pelaporan hingga dokumentasi. Fasilitator program, Bapak Suhadi, menyampaikan bahwa SOP sudah dilaksanakan, namun keterbatasan jumlah petugas menjadi kendala dalam efisiensi distribusi. Sebagian besar warga seperti Ibu Hasanah, Ibu Arminah, dan Bapak Ardiansyah menilai pelaksanaan sudah berjalan sesuai prosedur dan cukup rapi. Namun, terdapat juga beberapa masukan dari warga seperti Ibu Noor Farida yang merasa proses penentuan penerima masih kurang terbuka, dan Ibu Ricma yang menyoroti keterlambatan penyaluran serta kendala teknis di lapangan. Ibu Siti Jamiah juga menyoroti kurangnya sosialisasi, yang menyebabkan beberapa warga tidak siap dengan kelengkapan berkas. Di sisi lain, Bapak Ari Sandi menilai proses pendataan dan penjadwalan sudah berjalan baik.Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis menyimpulkan bahwa kesesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat dikatakan sudah baik, karena pelaksanaan telah mengikuti alur yang ditetapkan.

3. Kepuasan Terhadap Program

a. Hasil yang dirasakan

Dari hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa bantuan dari program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara umum sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama oleh keluarga penerima manfaat yang tergolong kurang mampu. Keberadaan bantuan berupa beras 10 kg sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga.

b. Keberhasilan Progam

Dari hasil wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan program bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kelurahan Belimbing dapat dikatakan sudah baik. Keberhasilan ini dapat dilihat dari tercapainya sebagian besar tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mengurangi beban pengeluaran warga melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok.

4. Tingkat Input dan Output

a. Persediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Kantor Kelurahan Belimbing di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persediaan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pelaksanaan Program Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) masih kurang baik. Hal ini terlihat dari keterbatasan jumlah petugas di tingkat kelurahan, tidak adanya tim khusus untuk program CPP, serta kebutuhan tenaga tambahan yang sering kali diisi oleh fasilitator dari Dinas Sosial. Dari hasil observasi penulis, disimpulkan bahwa keterbatasan SDM ini mengakibatkan

pelaksanaan penyaluran bantuan terkadang menjadi kewalahan, terutama saat jumlah penerima cukup banyak, sehingga proses pendataan dan pembagian memerlukan waktu dan tenaga ekstra.Dari hasil dokumentasi, terlihat bahwa petugas tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan ramah, namun tempat pelaksanaan penyaluran yang digunakan masih bervariasi seperti di Aula rapat, teras aula, atau halaman kantor kelurahan, yang menunjukkan belum adanya tempat khusus untuk kegiatan ini. Selain itu, waktu pelaksanaan juga belum terjadwal secara pasti dan sering bergantung pada arahan dari pihak pemerintah di tingkat atas, sehingga menyebabkan ketidakteraturan waktu yang berdampak pada kesiapan petugas di lapangan penulis menyimpulkan bahwa persediaan SDM dalam pelaksanaan Program Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah di Kelurahan Belimbing dapat dikatakan kurang baik..

b. Ketepatan Waktu Dan Tempat

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Kelurahan Belimbing dan sejumlah penerima bantuan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menunjukkan hasil yang berbeda antara ketepatan waktu dan ketepatan tempat. Untuk ketepatan tempat, pelaksanaan dinilai sudah baik, karena dilakukan di lokasi yang mudah dijangkau, seperti Kantor Kelurahan Belimbing yang dekat dengan domisili penerima bantuan.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, lokasi penyaluran terlihat sesuai dengan wilayah penerima bantuan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Lurah Kelurahan Belimbing yang menyatakan bahwa lokasi dipilih agar memudahkan masyarakat dalam menerima bantuan. Berikut dokumentasi tempat lokasi penyaluran:

Namun, dari sisi ketepatan waktu, pelaksanaan masih belum baik. Meskipun bantuan disalurkan setiap bulan, tanggalnya sering berubah-ubah dan tidak selalu sesuai jadwal yang direncanakan. Penyaluran juga kadang dirapel jika terjadi keterlambatan distribusi dari dinas terkait, seperti Bulog Penerima bantuan menyebutkan bahwa penyaluran bisa dilakukan di awal, tengah, atau akhir bulan, dan tidak jarang menunggu informasi lebih lanjut dari pihak kelurahan.

Dengan demikian, berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa ketepatan tempat dalam penyaluran bantuan CPP cukup baik, karena ketepatan waktunya masih perlu kepastian.

5. Pencapaian Menyeluruh

a. Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat Kelurahan Belimbing, Lurah, serta perangkat kelurahan yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bantuan Cadangan Pangan

Pemerintah (CPP), maka dapat disimpulkan bahwa perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat cukup baik. Karena dari berbagai pendapat bahwa bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), sangat membantu masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu dan lansia, dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa beras. Bantuan ini dirasakan sangat berarti di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu serta naiknya harga pangan. Masyarakat merasa bahwa bantuan tersebut mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga setiap bulannya, meskipun belum bisa mengangkat taraf ekonomi secara keseluruhan. Namun, terdapat pula pandangan kritis yang menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap bantuan masih tinggi, sehingga mempengaruhi semangat untuk mandiri. Beberapa warga bahkan mengeluh ketika bantuan mengalami keterlambatan, karena mereka telah terbiasa mengandalkan bantuan tersebut. Selain itu, distribusi manfaat bantuan belum merata dan dampaknya belum terlalu besar bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap. Dari hasil observasi penulis, dapat disimpulkan bahwa perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat memang mulai terlihat, namun belum bisa dikatakan sepenuhnya baik. Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berperan besar dalam meringankan beban ekonomi, tetapi belum menyentuh aspek kemandirian dan perbaikan ekonomi jangka panjang.

b. Tercapainya Tujuan Program

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Kelurahan Belimbing, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian program Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ini dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari kesesuaian tujuan program yang telah direncanakan oleh pihak Kelurahan Belimbing dengan pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah, Kasi Kesejahteraan, staf kelurahan, serta fasilitator program, ditemukan bahwa program telah berhasil menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak dan membantu mencukupi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya berupa beras. Namun demikian, beberapa hal seperti pendataan domisili dan keterbatasan personel distribusi masih perlu pembenahan agar efektivitas program dapat lebih maksimal.

Dari wawancara dengan para penerima bantuan, sebagian besar merasa tujuan program sudah tercapai karena terbukti membantu kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu. Namun, terdapat juga beberapa penerima yang merasa pelaksanaan program masih belum maksimal, karena pelaksanaan nya belum sesuai sasaran, masih terdapat kekurangan, dan banyak kendala di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan program Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ini dapat dikatakan cukup baik, meskipun masih terdapat

beberapa aspek teknis dan pelaksanaan di lapangan yang perlu ditingkatkan agar dapat mencapai efektivitas secara menyeluruh.

6. Faktor yang Mempengaruhi

a. Faktor Penghambat

1) Kurangnya Ketepatan Waktu dalam Penyaluran

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kelurahan Belimbing masih belum berjalan secara konsisten dan tepat waktu. Hal ini terlihat dari jadwal penyaluran yang tidak menentu, di mana penyaluran bantuan bisa terjadi di awal, pertengahan, atau bahkan akhir bulan, tergantung kedatangan bantuan dan informasi dari dinas terkait. Berdasarkan hasil observasi penulis di Kelurahan Belimbing, diketahui bahwa ketidaktepatan waktu ini diperparah dengan kurangnya kejelasan informasi dari Dinas Ketahanan Pangan kepada pihak kelurahan. Akibatnya, informasi tidak langsung tersampaikan ke warga, sehingga banyak masyarakat yang kebingungan dan harus menunggu kabar dari RT atau pihak kelurahan mengenai kapan penyaluran akan dilakukan. Selain itu, dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa kendala administratif dalam proses penyaluran, seperti kewajiban memfoto penerima dengan KTP atau perwakilan dengan KK meskipun data sudah lengkap, menambah beban pekerjaan petugas di lapangan. Hal ini menyebabkan proses penyaluran menjadi lebih lama dan rumit. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Belimbing belum berjalan secara efisien dari segi waktu dan administrasi. Waktu pelaksanaan yang tidak menentu dan prosedur administratif yang cukup memberatkan menjadi faktor utama keterlambatan dan ketidaktepatan penyaluran bantuan. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat penerima manfaat harus menunggu lebih lama atau bahkan menerima bantuan yang dirapel ke bulan berikutnya.

2) Data Penerima Tidak Akurat

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) masih belum tepat sasaran dari pihak penyalur. Hal ini terlihat dari adanya warga yang secara ekonomi mampu tetapi tetap menerima bantuan, sedangkan warga yang lebih membutuhkan justru tidak terdata sebagai penerima bantuan. Dari hasil observasi dan keterangan warga, penulis menyimpulkan bahwa distribusi bantuan belum merata dan kurang memperhatikan

prioritas terhadap warga yang paling membutuhkan yang Dimana data penerima yang sudah terdaftar oleh dinas ketahanan pangan belum tentu yang layak menerima bantuan tersebut dan dari pihak kelurahan yang tidak memferivikasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan ini menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaan program ini, sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Proses penyaluran bantuan perlu diperbaiki agar lebih transparan dan benar-benar memprioritaskan warga yang paling membutuhkan.

b. Faktor Pendukung

1) Kesesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelayanan dalam program bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ini dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan dan bantuan yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasanah saat merasa bingung mengenai perlengkapan yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan pangan. Selain itu, sistem pembagian yang jelas dan terjadwal membuat proses pembagian berjalan dengan lancar dan tertib, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Arminah dan Bapak Ardiansyah yang menilai petugas sigap dan proses pembagian cepat. Tidak kalah penting, pelaksanaan pembagian beras yang rapi dan sesuai aturan juga turut menunjang kelancaran program ini, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ari Sandi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelayanan yang ada dalam program bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ini sangat baik karena pelayanannya yang informatif, terstruktur, dan tertib dalam pelaksanaan pembagiannya.

2) Tingkat Pengetahuan Masyarakat

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari pemahaman masyarakat yang mayoritas sudah mengetahui tentang adanya program bantuan berupa beras dari pemerintah, meskipun masih ada sebagian kecil warga yang belum memahami secara mendalam mengenai mekanisme pendataan dan kriteria penerima bantuan. Dari hasil observasi, penulis menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat sudah berada pada kategori cukup baik, ditunjukkan dengan antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan penyaluran dan kesadaran mereka terhadap pentingnya program ini sebagai bentuk

dukungan pemerintah dalam menghadapi kondisi darurat seperti kenaikan harga sembako atau bencana alam.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program bantuan pangan non-tunai (CPP) sudah berada pada kategori baik. Hal ini terlihat dari berbagai sumber informasi yang diterima masyarakat, seperti dari RT, pertemuan warga, maupun grup WhatsApp, yang berperan penting dalam menyebarluaskan informasi program. Sebagian besar masyarakat menyadari manfaat dan tujuan dari bantuan ini, terutama dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang membutuhkan.

SIMPULAN

Efektivitas Program Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam rangka pemberian bantuan pangan di Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong cukup baik, hal ini dapat dilihat dari yakni*: Pertama*, Keberhasilan Program, pada indikator Pengetahuan Masyarakat, cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sebagian masyarakat yang sudah memahami Program melalui sosialisasi. Pada indikator Informasi Yang Didapat, dikatakan kurang baik, karena penyampaian hanya dilakukan sekali di awal program dan belum menjangkau seluruh warga secara menyeluruh. *Kedua*, Keberhasilan Sasaran, pada indikator Ketepatan Sasaran, Kurang baik. Masih terdapat penerima bantuan yang tidak tepat, seperti warga mampu, pindah domisili, serta warga layak yang tidak terdata akibat data yang kurang valid. Pada indikator Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari alur pelaksanaan yang sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. *Ketiga*, Kepuasan Terhadap Program, pada indikator Hasil Yang Dirasakan Masyarakat, cukup baik. Penerima merasa terbantu karena bantuan ini mengurangi pengeluaran sehari-hari. Pada Indikator Keberhasilan Program, pelaksanaan CPP di Kelurahan Belimbing sudah berjalan dengan baik, karena mengurangi beban ekonomi. *Keempat*, Tingkat Input dan Output, pada indikator Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kurang baik, karena keterbatasan jumlah petugas di tingkat kelurahan, tidak adanya tim khusus untuk program bantuan. Pada indikator Ketepatan Tempat Dan Waktu, dapat dikatakan cukup baik, karena tempat mudah dijangkau dan waktu perlu dimintai kepastian. *Kelima*, Pencapaian Tujuan Menyeluruh, pada indikator Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, dapat dikatakan cukup baik, karena bantuan ini membantu mengurangi pengeluaran dan memberi rasa aman dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pada indikator Ketercapaian Program, cukup baik, karena program ini telah membantu menjaga ketahanan pangan masyarakat sesuai dengan rencana pemerintah.

Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam rangka pemberian bantuan pangan di Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan ini: *Pertama* faktor pendorong, meliputi kepatuhan terhadap SOP yang menghasilkan pelayanan tertib dan informatif. Dari hasil yang dirasakan, masyarakat memperoleh bantuan secara ekonomi, keberhasilan program dinilai mampu meringankan beban Masyarakat, serta terjadi perubahan sosial ekonomi yang positif, di mana program ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. *Kedua* faktor penghambat, yaitu dalam pelaksanaan program ini meliputi: keterlambatan informasi yang menyebabkan waktu penyaluran tidak tepat, pendataan penerima yang kurang akurat sehingga bantuan tidak selalu tepat sasaran, pelayanan yang belum maksimal akibat keterbatasan jumlah petugas, serta tidak konsistennya jadwal penyaluran yang mengganggu kelancaran proses distribusi..

DAFTAR PUSTAKA

Cambel J.P, Mutiarin, Dyah Da Arif Zaenudin.2014 *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2021. *Metode penelitian administrasi* (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D (edisi revisi). Bandung Alfabeta

Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran *Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan.*

Steers, M Richard. 2014. *Efektivitas Organisasi Perusahaan* (Cetakan ke 4) Jakarta: ErlanggaSondang P. Siagian. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Jakarta: Bumi Aksara